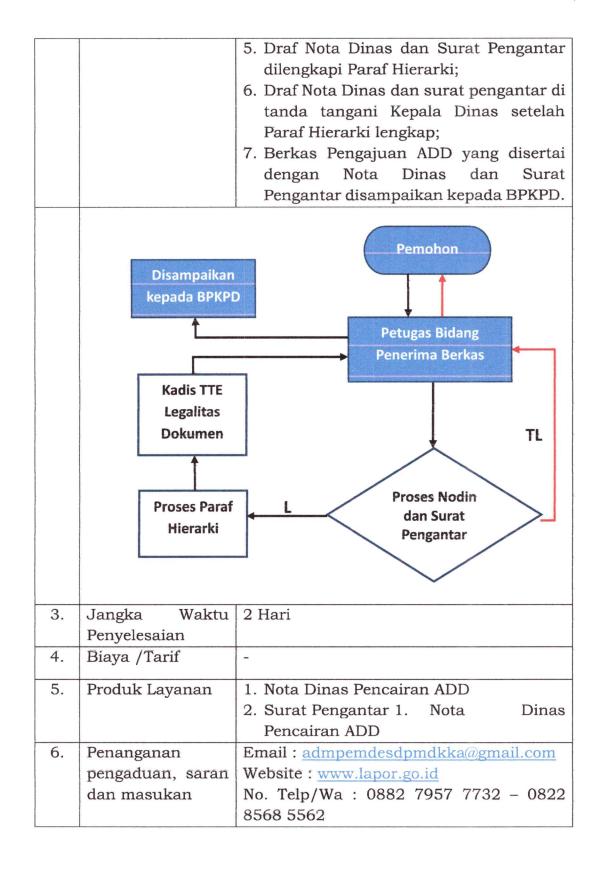
#### BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

### 1. PELAYANAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (APBD)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>Permohonan Pencairan Kepala Desa melalui Camat (Stempel Cap Basah);</li> <li>Peraturan Desa Tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan dan/atau</li> </ol>
		Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
		3. Laporan Realisasi ADD:
		a. tahun sebelumnya untuk penyaluran bulan Januari tahun berjalan;
		b. bulan sebelumnya untuk
		pencairan bulan berjalan mulai
		Februari sampai dengan Desember;
		4. Fotocopy Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa Penerima ADD;
		5. Fotocopy KTP Kepala Desa;
		6. Fotocopy NPWP Desa;
		7. Kwitansi bermaterai Rp.10.000 ;
		8. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp.10.000;
		9. Pakta Integritas bermatera:
		10. Materai Rp.10.000 sebanyak 3 (tiga) Lembar;
2.	Sistem,	1. Pemohon datang membawa berkas
	Mekanismen dan	yang telah ditentukan;
	Prosedur	2. Berkas persyaratan diterima dan
		checklist oleh Petugas Bidang;
		3. Jika berkas lengkap, Petugas Bidang
		menyiapkan draf Nota Dinas Pencairar
		ADD dan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Kepala BPKPD;
		4. Jika berkas tidak lengkap, petugas
		bidang mengembalikan kepada
	Į	Pemohon untuk dilengkapi);



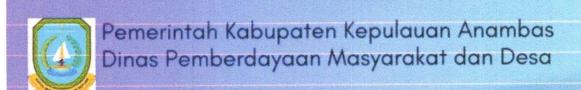
PENC	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)				
No.	Komponen	Uraian			
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa;</li> <li>Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa;</li> <li>Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa.</li> </ol>			
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Alat Tulis 6. Meja Kursi;</li> <li>Kantor; 7. Rak Arsip;</li> <li>Kertas HVS; 8. Toilet;</li> <li>Komputer dan Printer;</li> <li>Jaringan Internet;</li> <li>Ruang Tunggu;</li> </ol>			

9.	Kompetensi	<ol> <li>Mampu mengoperasikan komputer;</li> </ol>
	Pelaksana	<ol><li>Memahami proses layanan;</li></ol>
		3. Memahami peraturan perundang-
		undangan tentang Pencairan Alokasi
		Dana Desa (APBD);
10.	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
		<ol> <li>Bagian penerimaan berkas;</li> </ol>
		<ol><li>Bagian pemeriksaan berkas;</li></ol>
		3. Bagian pemrosesan berkas;
12.	Jaminan	Diwujudkan dengan adanya kepastian
	Pelayanan	persyaratan, waktu proses, dan didukung
		oleh SDM yang berkompeten di bidang
		tugasnya.
13.	Jaminan	Standar pelayanan dan standar
	Keamanan dan	Operasional Pelayanan
	Keselamatan	
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
	Pelaksana	langsung terkait dengan kinerja dan
		kedisiplinan.

KEPALA DINAS,

Teti Arnita, S.E.

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19790101 200212 2 009

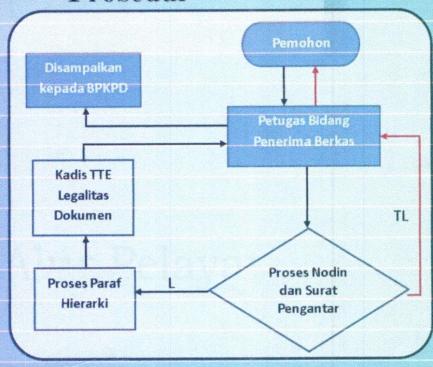


# Pelayanan Pencairan ADD (APBD)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Persyaratan

- Surat Permohonan
- Salinan Perdes
   Apbdes/Perubahan
   Apbdes
- Laporan Realisasi
   Tahap sebelumnya
- Salinan KTP/Buku
   Bank/ NPWP
- Kwitansi, Amprah dan SPTJM



Waktu Penyelesaian : 2 Hari

Biaya: Gratis

Informasi Pelayanan





admpemdesdpmdkka@gmail.com



www.lapor.go.id